

Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia

Syahril

rilmpd@gmail.com

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman budaya yang sangat kompleks. Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada era globalisasi ini, pertemuan serta benturan-benturan budaya seringkali tidak dapat dihindarkan. Hal ini akan berdampak pada layanan bimbingan dan konseling yang menyebabkan “Perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien yang berbeda budaya tidak dapat dihindari. Untuk itu, seorang konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural, karena dalam konseling lintas budaya yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sangat rawan terjadinya bias-bias budaya menyebabkan konseling tidak berjalan efektif. Dalam konteks budaya Indonesia salah satu komponen budaya yang perlu menjadi perhatian seorang konselor adalah yang berkaitan dengan orientasi nilai budaya, yang disebut oleh Koentjaraningrat sebagai mentalitas. Pemahaman terhadap orientasi nilai budaya ini akan sangat membantu seorang konselor dalam memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya secara efektif.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Lintas Budaya

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman budaya yang sangat kompleks atau dikenal juga dengan masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang menjadi ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Dari sini kemudian muncul istilah multikulturalisme yang pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai

kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam “*politics of recognition*” (Azyumardi Azra, 2007). Dengan demikian multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme adalah

penerimaan dan penghargaan terhadap suatu kebudayaan, baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Setiap orang ditekankan untuk saling menghargai dan menghormati setiap kebudayaan yang ada di masyarakat. Apapun bentuk suatu kebudayaan harus dapat diterima oleh setiap orang tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

Multikulturalisme di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Secara geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana tiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling, khususnya dalam konteks Indonesia, seorang konselor tidak dapat mengabaikan klien yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, tidak tertutup kemungkinan seorang konselor akan berhadapan dengan klien yang berbeda baik dalam hal kepribadian, nilai, moral maupun budaya. Dalam hal ini, seorang konselor perlu memberikan penghargaan serta penilaian atas budaya yang dianut klien tanpa meremehkan atau memojokkan

kebudayaannya. Dengan demikian relasi konseling tidaklah sederhana. Konselor harus memiliki kesadaran adanya perbedaan karakteristik (pribadi, nilai, moral, budaya) antara dirinya dengan kliennya, serta menghargai keunikan kliennya. Perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi proses konseling. Di sinilah perlunya konseling berwawasan lintas budaya, yaitu konseling yang mengakomodasi adanya perbedaan budaya antara konselor dan klien. Konseling berwawasan lintas budaya akan mengeliminir kemungkinan munculnya perilaku konselor yang menggunakan budayanya sendiri (*counselor encaptulation*) sebagai acuan dalam proses konseling.

Perbedaan budaya akan menyebabkan pula pemahaman dan cara tersendiri dalam menjalin komunikasi dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Dipandang dari perspektif budaya, situasi konseling adalah sebuah perjumpaan kultural antara konselor dengan klien. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kepekaan budaya agar dapat memahami dan membantu klien sesuai dengan konteks budayanya. Konselor yang demikian adalah konselor yang menyadari benar bahwa secara kultural, individu memiliki karakteristik yang unik dan dalam proses konseling akan membawa karakteristik tersebut. Artikel ini akan mencoba membahas tentang pentingnya pemahaman konseling lintas budaya dalam perspektif keragaman budaya di Indonesia

sebagai salah satu landasan dalam bimbingan dan konseling yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang konselor atau para pendidik dalam memberikan layanan dan bimbingan konseling kepada klien atau siswanya.

B. Pembahasan

1. Pengertian Konseling Lintas Budaya

Konseling lintas budaya merupakan suatu proses konseling yang melibatkan antara konselor dan klien yang berbeda budayanya dan dilakukan dengan memperhatikan budaya subyek yang terlibat dalam konseling. Konseling lintas budaya melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai "Perjumpaan budaya" (*cultural encounter*) antara konselor dan klien (Supriadi, 2001: 6). Dengan memperhatikan budaya, maka konseling merupakan pepaduan partner secara meningkat dari budaya

yang berbeda baik antara kelompok bangsa, kelompok etnik, atau kelompok-kelompok yang peranan mereka secara budaya dibedakan. Konsekuensinya adalah konselor harus mengetahui aspek-aspek khusus budaya dalam proses konseling dan dalam gaya konseling tertentu mereka, sehingga mereka dapat menangannya secara lebih terampil dengan variabel budaya itu (Jumarin, 2002: 29-30).

Pembahasan tentang persoalan konseling dalam konteks budaya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang budaya dalam konteks psikologi, karena dasar pijakan keilmuan konseling berakar dari psikologi. Terdapat beberapa ciri khas budaya dalam konteks Psikologi yaitu; (1) budaya sebagai sebuah konsep abstrak; aspek budaya yang dapat diamati sesungguhnya bukanlah budaya itu sendiri melainkan perbedaan perilaku manusia dalam aktivitas dan tindakan, pemikiran, ritual, tradisi, maupun material sebagai produk dari kelakuan manusia, (2) budaya sebagai konseptual kelompok; budaya ada ketika terjadi pertemuan antar manusia, yang di dalamnya akan membuahkan pola-pola adaptasi dalam perilaku, norma, keyakinan, maupun pemikiran dan atau ide, dan (3) budaya diinternalisasikan oleh anggota kelompok; budaya

adalah produk yang dipedomani oleh individu yang disatukan dalam sebuah kelompok, maka budaya adalah alat pengikat dari individu-individu yang memberi ciri khas keanggotaan suatu kelompok yang berbeda dengan individu-individu dari kelompok budaya lain. Budaya diinternalisasikan oleh seluruh individu anggota kelompok sebagai tanda keanggotaan kelompok, baik secara sadar maupun naluriah tidak disadari. (Matsumoto, 1996 :20). Berdasarkan pada tiga ciri khas budaya di atas, budaya dapat didefinisikan sebagai seperangkat sikap, nilai, keyakinan dan perilaku, pemikiran dan atau ide yang dimiliki oleh sekelompok orang yang akan mengalami perubahan secara kontinyu melalui proses komunikasi (Berger dan Thomas Luckmann, 1991: 66).

Budaya sebagai konstruk individual dan sosial memuat sistem nilai budaya (*cultural value system*) dan dalam konteks psikologi berperspektif budaya sistem nilai budaya merupakan hal yang mendasari sikap dan perilaku. Menurut Koentjaraningrat sistem nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat. Nilai budaya

merupakan hal-hal yang mereka anggap sebagai hal yang bernilai, berharga, dan penting bagi kehidupan. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman yang dapat memberi arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat: 1993: 3)

Dalam perspektif psikologi konseling, tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat akan terikat oleh kebudayaan yang terlihat wujudnya dalam berbagai pranata, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah laku manusia (Greetz, 1981: 34). Greetz (1981: 34) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan diambil bersama secara sosial, oleh para anggota suatu masyarakat, sehingga suatu kebudayaan bukanlah hanya akumulasi dari kebiasaan (*folkways*) dan tata kelakuan (*mores*) tetapi merupakan suatu sistem perilaku yang terorganisasi. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan menjadi acuan sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk individual yang tidak terlepas dari kaitannya pada kehidupan masyarakat dengan orientasi kebudayaannya yang khas.

Konseling lintas budaya berusaha memahami manusia secara menyeluruh dalam konteks budayanya melalui pendekatan yang bersifat interpretatif. Konseling lintas budaya menawarkan konsep

yang lebih komprehensif dengan membedah permasalahan psikologis sehari-hari melalui konteks budaya. Fungsi psikologis yang dimiliki oleh budaya memungkinkan dilakukannya kajian untuk memahami perilaku seseorang melalui peran sosial yang diharapkan, norma, dan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Dengan demikian konseling lintas budaya menggunakan pendekatan kontekstual atau pendekatan emik yang menolak keuniversalitasan teori-teori psikologi. Pendekatan emik menyatakan bahwa aspek kehidupan yang muncul dan benar hanya pada satu budaya tertentu, dan setiap budaya memiliki konsep yang unik. (Berry, 1992 : 277)

2. Urgensi Konseling Lintas Budaya dalam Masyarakat Global

Sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, pendidikan abad ke-21 seyogyanya mengedepankan dimensi-dimensi kekhasan, keragaman dan perbedaan budaya. Dengan kata lain, kecenderungan pendidikan yang berwawasan budaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia abad-21. Dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan konseling budaya khususnya konseling berperspektif budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan

psikodinamik, behavioral dan humanistic.

Pada abad 21 ini sudah selayaknya mempertimbangkan pembahasan dengan pendekatan yang integral dengan mengedepankan nilai totalitas pada kekhasan budaya individu. Dalam masyarakat global yang semakin terbuka serta berkembangnya beragam kebudayaan dalam masyarakat, konseling berwawasan lintas budaya menjadi begitu penting. Perjumpaan budaya dalam masyarakat global menjadi semakin terbuka dan hampir tanpa batas. Ketika konseling yang lebih mementingkan individu dalam proses konseling, tanpa peduli atmosfer yang melingkupi proses konseling, baik dalam konseling individual maupun konseling kelompok, atau atmosfer baru yang muncul dalam proses konseling, maka proses konseling akan berupa semacam khotbah indoktrinasi, atau pengajaran. Di samping itu pula, konseling berwawasan lintas budaya meliputi isu tentang penerapan dan implikasi teori-teori, pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip konseling yang berasal dari suatu konteks budaya tertentu ke dalam konteks budaya lain yang berbeda.

Pelaksanaan konseling dalam konseling lintas budaya akan melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling

sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Efektifitas pelaksanaan konseling, bagi konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien.

Supriatna (2011: 177) menjelaskan untuk memasukkan unsur keberwawasan budaya dalam merancang dan meng-implementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dalam rangka menjawab tantangan utama bagi seseorang konselor sekolah. Pengkajian dapat dilakukan baik dalam bentuk studi literatur, pengamatan intensif, maupun secara partisipasi dalam pergaulan dengan khalayak konselital. Pengkajian yang dimaksud terutama difokuskan atau untuk menjawab tantangan, bahkan konselor sekolah yang bekerja dengan individu yang berbeda dengan latar belakang budayanya, hendaknya mampu dan sanggup mendemonstrasikan pemahaman dan apresiasinya terhadap per-

bedaan budaya. Kemampuan dan kesanggupan tersebut pada gilirannya diformulasikan ke dalam sebagian pernyataan tujuan yang akan dicapai melalui program bimbingan dan konseling yang dirancang, dan ketrampilan-ketrampilan yang bersifat responsif untuk kepentingan layanan konseling terhadap konseli. Langkah berikutnya adalah merefleksikan kondisi lingkungan budaya persekolahan. Baik yang menyangkut keragaman asal-usul personel sekolah dan pola interaksi di antara mereka, berbagai variabel latar belakang yang memungkinkan bias budaya, maupun budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di sekolah. Refleksi ini penting, terutama untuk merancang perangkat-perangkat pengidentifikasi dan garis-garis besar strategis intervensi melalui layanan bimbingan dan konseling.

Dalam implementasinya, konselor sekolah yang responsif secara budaya harus berupaya menggunakan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan multibudaya di dalam konteks pertemuan yang terfokus pada perkembangan akademik, karier, pribadi ataupun sosial serta kebutuhan para siswa dari lingkungan yang secara budaya berbeda. Penerapan konseling berwawasan lintas budaya mengharuskan konselor peka dan tanggap terhadap budaya, keragaman budaya dan adanya perbedaan budaya antar

kelompok klien yang satu dengan kelompok klien yang lainnya, dan antara konselor sendiri dengan kliennya

3. Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia

Dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling, khususnya dalam perspektif masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya, seorang konselor perlu mengetahui, memahami dan memperhatikan komponen-komponen kekhasan budaya yang ada di Indonesia baik dari segi demografis, sosial-ekonomi, bahasa, adat-istiadat, maupun latar belakang budaya dan wilayah dengan keunikannya masing-masing. Salah satu komponen budaya di Indonesia yang perlu menjadi perhatian konselor adalah orientasi nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang disebut oleh Koentjaraningrat sebagai mentalitas. Menurut Koentjaraningrat (1993 : 3) terdapat empat komponen mentalitas menonjol yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang berkaitan dengan : (1) konsep waktu yang sifatnya sirkuler (waktu itu “beredar” tidak “berlangsung”); (2) menggantungkan hidup pada nasib; (3) sikap kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat kuat; dan (4) orientasi nilai budaya vertikal.

Pertama, persepsi waktu yang sirkuler merupakan

gagasan dan keyakinan bahwa masa yang telah lampau selalu akan kembali. Persepsi waktu yang beredar tidak linier disebabkan oleh kehidupan agraris, yang menunjukkan lingkaran proses pertanian akan terulang tiap tahun. Hal inipun masih melatarbelakangi cara berpikir orang Indonesia pada umumnya, meskipun kaum pelajar di Indonesia telah banyak berpikir berdasarkan konsep waktu yang linier. Konsep waktu yang sirkuler dalam cara berpikir umumnya orang Indonesia, seyogyanya dipahami oleh konselor sebagai bahan masukan guna mengantisipasi atau memprediksi persepsi dan sikap klien terhadap persoalan yang tengah dihadapinya.

Munculnya persepsi tentang waktu, besar kemungkinan akan berdampak pada anggapan dan sikap, bahwa persoalan yang dihadapi adalah biasa sehingga tidak membutuhkan orang lain untuk mengatasinya; mengingat orang lain pun juga mengalami hal yang sama dan selalu berulang. Kalaupun persoalan itu dibicarakan, terbatas pada lingkup orang-orang yang berlatar atau berkaitan secara kekeluargaan dan hanya menegaskan bahwa mereka pun mengalami hal yang sama. Pendek kata, persoalan kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang biasa, karena akan hilang dan muncul secara alami. Dampaknya tidak kreatif dan inovatif dalam

memproduksi piranti keras ataupun lunak dalam kehidupannya.

Kedua, orientasi nilai budaya yang juga berakar pada kebudayaan agraris ditambah dengan keadaan yang diakibatkan oleh kemiskinan telah melahirkan sikap hidup yang menggantungkan diri pada nasib.

Menurut Koentjaraningrat (1993 : 3) apabila kita menginginkan peningkatan kemakmuran melalui jalur industrialisasi, maka orientasi nilai budaya atau mentalitas seperti itulah, yang sangat perlu diubah atau digeser menjadi mentalitas yang lebih aktif. Orang yang terlalu bergantung pada nasib melahirkan sikap kepasrahan diri pada nasibnya sendiri, kehilangan semangat untuk berusaha, menjalani hidup apa adanya tanpa perencanaan. Dalam pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, para konselor dituntut untuk memperkaya wawasan tentang konsep takdir. Menggugah kiat untuk menjadi pribadi yang aktif dan proaktif serta mengembangkan layanan konseling berdasarkan landasan nilai optimistik dan pandangan kehidupan yang mencerahkan secara hakiki.

Ketiga, orientasi nilai budaya yang berupa sikap kekeluargaan dan gotong-royong. Nilai budaya kekeluargaan dan gotong royong sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat

Indonesia. Kendati mentalitas ini menyiratkan kesamaan pada umumnya, tetapi dalam prakteknya berbeda. Koentjaraningrat (1993: 3) mengemukakan, dalam diskusi-diskusi pernah diajukan kemungkinan, bahwa untuk industrialisasi diperlukan mentalitas yang lebih mandiri, lebih bertanggungjawab sendiri, tidak terlampau menggantungkan diri pada keluarga ataupun bantuan gotong-royong dari lingkungan. Selanjutnya dia menyatakan, banyak di antara kita memang masih perlu membiasakan diri untuk bersikap lebih mandiri dalam banyak hal, serta lebih berani bertanggungjawab atas kekurangan dan kesalahan kita, tanpa mengurangi asas kekeluargaan dan penggeseran mentalitas yang terlalu menggantungkan diri pada gotong-royong. Namun tidak perlu khawatir, bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong menghambat kemajuan; sebab walaupun asas kekeluargaan dalam masyarakat Jepang tetap kuat, bangsa Jepang telah berhasil menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia, dan memiliki sistem industri yang sangat maju. Implikasi dari komponen ketiga bagi pengembangan bimbingan konseling di Indonesia adalah pengembangan piranti-piranti strategis untuk kepentingan konseling kelompok dan konseling keluarga dalam

perspektif lintas budaya. Dasar pertimbangannya adalah, bahwa orientasi nilai budaya kekeluargaan dan gotong-royong merupakan modal landasan konseptual yang dapat dijadikan mediator guna memfasilitasi keberlangsungan konseling berwawasan budaya dalam konseling individual maupun konseling kelompok.

Komponen *keempat*, yaitu orientasi vertikal, terasa kuat tidak hanya dalam masyarakat Jawa dan Bali, tetapi juga dalam sebagian besar penduduk Sumatera dan Indonesia Timur. Kenyataan ini merupakan hasil penelitian orang Indonesia sendiri di beberapa tempat di Nusantara. Orientasi vertikal adalah sikap kepatuhan pada orang tua, senior, guru, pemimpin, orang berpangkat tinggi, komandan, dan sebagainya, sehingga seseorang dengan orientasi vertikal tidak akan bertindak tanpa suatu instruksi atau restu. Khusus dalam budaya Jawa, ketaatan merupakan sifat yang dinilai sangat tinggi. Anak yang penurut adalah anak yang terpuji, sedangkan anak yang selalu mempunyai kehendak sendiri dan gemar mengeksplorasi segala hal di sekitarnya, dianggap sebagai pengganggu dan tidak santun.

Lebih lanjut Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa kebanyakan orang Indonesia lemah dalam mentaati hal-hal yang kurang konkret, seperti ; hukum dan peraturan-

peraturan, mereka lebih yakin kepada hal yang lebih abstrak, yaitu prinsip. Namun orang Indonesia pada umumnya taat untuk menjalani ibadah keagamaan, sehingga pelaksanaan sila pertama dalam ideologi negara dapat memperkuat eksistensi ketenteraman jiwa manusia. Manusia yang hidup dalam masa pancaroba yang sedang dan masih akan dialami dalam 25 tahun mendatang. Tampaknya ketaatan seperti itu perlu dipertahan, terutama dalam kerangka penumbuh-kembangan prinsip disiplin yang tidak bergantung pada ada atau tidak adanya pengawasan. Konsep Islam tentang *khushu'* dalam shalat dan *imsyak* dalam shaum (puasa) perlu dikaji secara komprehensif untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam landasan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan konseling. Dalam konteks pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia, rupanya diperlukan pengkajian lintas disiplin yang terfokus pada perspektif metafisis tentang orientasi nilai vertikal dan latar belakang sikap "Orang atasan" terhadap perilaku dan nilai ketaatan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa keragaman budaya, juga menyebabkan beragamnya nilai dan orientasi nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Maka dalam

perspektif keragaman budaya di Indonesia dan dalam bimbingan konseling lintas budaya, seorang konselor di antaranya perlu memperhatikan dan memahami nilai-nilai dan orientasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang multikultural.

A. Kesimpulan

Konseling lintas-budaya merupakan layanan bantuan kepada konseli dengan memperhatikan latar budayanya. Hubungan konselor-konseli pada dasarnya merupakan hubungan dua orang yang memiliki keberbedaan budaya. Perhatian terhadap latar budaya konseli penting untuk dilakukan mengingat faktor budaya memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan konseling. Latar budaya yang mempribadi dalam diri konseli merefleksikan cara pandang konseli terhadap masalah dan tingkah laku aktual dalam menghadapi masalah. Pelaksanaan konseling dipengaruhi oleh beragam entitas. Salah satu entitas di maksud adalah faktor budaya. Faktor budaya tersebut *imerge* dalam hubungan konselor-klien. Keberbedaan dan keberagaman budaya yang menjadi latar pribadi konselor dan konseli cenderung dapat menghambat pelaksanaan konseling.

Dalam masyarakat global yang semakin terbuka serta berkembangnya beragam kebudayaan dalam masyarakat, konseling berwawasan lintas budaya menjadi begitu penting.

Sesuai dengan itu maka diperlukan pendekatan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam layanan dan bimbingan konseling. Pentingnya wawasan lintas budaya dalam bimbingan konseling mengingat perjumpaan budaya dalam masyarakat global menjadi semakin terbuka dan hampir tanpa batas.

Dalam konseling lintas budaya akan terjadi “perjumpaan budaya” melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Efektifitas pelaksanaan konseling, bagi konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien.

Mengingat setiap klien memiliki kekhasan perilaku yang melekat berdasarkan budaya yang dibawa, maka dalam perspektif budaya Indonesia, salah satu komponen budaya di Indonesia yang perlu menjadi perhatian konselor adalah orientasi nilai budaya yang dianut oleh masyarakat yang disebut oleh Koentjaraningrat sebagai mentalitas, yang meliputi orientasi budaya yang berkaitan: (1) konsep

waktu yang sifatnya sirkuler (waktu itu “beredar” tidak “berlangsung”); (2) menggantungkan hidup pada nasib; (3) sikap kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat kuat; dan (4) orientasi nilai budaya vertikal. Pengetahuan serta pemahaman terhadap orientasi nilai budaya dalam masyarakat akan sangat membantu seorang konselor dalam memberikan bimbingan dan layanan kepada klien secara lebih efektif.

Koentjaraningrat (1993). *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UIP.

Pedersen. P. (1991). *Counseling Across Cultures*. East-West Center Book: University Press of Hawaii.

Supriyatna, M.(2011). *Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Daftar Pustaka

Berger P. L. & Thomas Luckmann, L. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge*.

Corey, G. (1991). *Theory and Practice of Group Counseling*. California: Brooks / Cole Publishing Company.

-----, (1991). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy* Diterjemahkan oleh Mulyarto. Semarang: IKIP Press.

Supriadi, Dedi. (2001). *Konseling Lintas Budaya: Isu – isu dan relevansinya di Indonesia*. Bandung: UPI.

Greetz, C. (1981). *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Jumarin. (2002). *Dasar-Dasar Konseling Lintas-Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.